

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena migrasi ke luar negeri merupakan elemen yang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Penghasilan yang di dapatkan dengan menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri juga sangat menjanjikan, apalagi pada saat ini sudah ada sebuah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Secara historis, para TKI awalnya di dorong oleh keinginan sejumlah angkatan kerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak di luar negeri, karena di dalam negeri hal tersebut belum tersedia dengan harapan mereka. Keberhasilan sejumlah TKI pemula di tandai oleh gaji tinggi yang menggiurkan dan perolehan kekayaan yang menjanjikan untuk ukuran pekerja migran yang menjadikan faktor penarik tersendiri bagi angkatan kerja Indonesia. Fenomena ini berlangsung semenjak tahun 1980-an sampai dengan saat ini, sehingga keputusan menjadi TKI pun kini

merupakan pilihan menarik bagi jutaan angkatan kerja di seluruh pelosok Indonesia.¹

Beberapa alasan yang mendorong para tenaga kerja untuk pergi ke luar negeri dikarenakan kesempatan kerja di luar negeri lebih terbuka dengan tingkat upah yang di tawarkan cukup menjanjikan. Dengan hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi para TKI untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Selain itu, ada juga yang beranggapan seseorang menjadi TKI dikarenakan tidak stabilnya perekonomian di Indonesia.²

Tabel 1. 1
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
di Kabupaten Blitar tahun 2018-2019

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019 Annual Population Growth Rate (%) 2018-2019
(1)	(2)	(3)
Bakung	28 375	1,89
Wonotirto	39 290	1,78
Panggungrejo	43 882	1,76
Wates	31 713	2,16
Binangun	47 980	2,04
Sutojayan	53 300	2,00
Kademangan	72 450	1,93
Kanigoro	81 816	2,13
Talun	67 022	1,87
Selopuro	45 828	2,30
Kesamben	55 668	1,93
Selorejo	40 925	2,58
Doko	42 707	1,97
Wingi	55 728	1,94
Gandusari	75 610	2,20
Garum	69 750	1,88
Nglegok	76 941	2,08
Sanankulon	57 977	2,03
Ponggok	110 711	2,05
Srengat	69 201	1,91
Wonodadi	51 192	1,77
Udanawu	43 866	1,95
Kabupaten Blitar		
Hasil Registrasi/Registration Result	1 261 932	2,01
Hasil Proyeksi /Projection Result	1 160 677	0,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

¹Ismantoro Dwi Yuwon, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 9-11

²Rachmad syafa'at, *Menggagas Kebijakan Pro TKI*, (Blitar : Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Universitas Brawijaya, 2002), hlm.18

Dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, pertumbuhan penduduk Kecamatan Selopuro menempati posisi kedua paling besar, yaitu 2,30 persen dengan kepadatan penduduk mencapai 1.218 jiwa. Menurut hasil proyeksi SP'2010 tercatat penduduk Kecamatan Selopuro pada Tahun 2018 adalah 47.885 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Selopuro yang sebesar itu, dengan mata pencaharian pokok/utama adalah sektor pertanian, disusul dengan sektor perdagangan, kemudian karyawan. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan pengeluaran rumah tangga masyarakat Kecamatan Selopuro semakin besar. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran kebutuhan rumahtangga inilah yang menjadi faktor pendorong masyarakat Kecamatan Selopuro untuk migrasi TKI ke luar negeri.

Tabel 1. 2
Daftar Rekapitulasi Calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Blitar Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah	No	Kecamatan	Jumlah
1	Ponggok	507	12	Udanawu	186
2	Gandusari	264	13	Wlingi	185
3	Kademangan	252	14	Wonodadi	168
4	Talun	250	15	Doko	164
5	Nglegok	246	16	Bakung	153
6	Kanigoro	225	17	Garum	150
7	Srengat	221	18	Selorejo	142
8	Wonotirto	213	19	Binangun	135
9	Sutojayan	211	20	Sanankulon	132
10	Selopuro	211	21	Wates	124
11	Kesamben	208	22	Panggungrejo	113
JUMLAH					4460

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

Berdasarkan tabel 1.2 diatas merupakan tabel rekapitulasi mengenai jumlah data yang dihitung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi

Kabupaten Blitar tahun 2018. Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa di tahun 2018 jumlah calon pekerja migran Indonesia sejumlah 4460 orang dimana Kecamatan Selopuro memiliki jumlah calon pekerja migran yang cukup banyak yaitu 211 orang. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi di Kecamatan Selopuro dan diiringi oleh kepadatan penduduk menjadikan masyarakat daerah Kecamatan Selopuro tidak seimbang sebagaimana di paparkan pada tabel 1.1. Dalam hal ini menjadi sangat menarik untuk dijadikan alasan masyarakat di Kecamatan Selopuro memiliki keinginan yang kuat untuk merubah perekonomian keluarga dan daerahnya. Hal ini diperkuat dengan rendahnya tingkat pendidikan di kecamatan selopuro dan banyaknya pengangguran dengan laju pertumbuhan yang setiap tahunnya meningkat. Jenjang pendidikan yang di tempuh masyarakat kecamatan selopuro mayoritas hanya pada jenjang SD/MI dan SMP/SLTA menjadikan masyarakat Kecamatan Selopuro sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, hal inilah yang mendorong masyarakat Kecamatan Selopuro memutuskan untuk menjadi TKI.

Kenaikan angka kemiskinan Kabupaten Blitar merupakan dampak dari beberapa fenomena yang terjadi. Trend angka kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir ini meurun, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,35 persen. Namun di tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Blitar mengalami peningkatan 0,39 persen poin mejadi 9,33 persen dibanding tahun 2019 sebesar 8,94 persen. Perkembangan pada tahun 2019-2020 adananya penurunan riil upah buruh tani nasional dan upah buruh bangunan masing-

masing sebesar 0,24 dan 0,15 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 tumbuh 2,97%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97%. Meskipun pada awal Maret 2020 kasus pandemic covid-19 belum memasuki Kabupaten Blitar, namun gejolak perekonomian yang mulai lesu di luar Kabupaten Blitar telah berdampak pada perekonomian penduduk. Merosotnya ekonomi mulai dari meurunnya permintaan hasil pertanian dan industri, pengurangan tenaga kerja di sektor akomodasi, transportasi, dan anjloknya sektor pariwisata akibat ditutupnya jalur internasional membawa imbas tidak langsung terhadap perekonomian.

Semakin bertambahnya kebutuhan hidup serta sulitnya mencari pekerjaan yang ada di daerah Kecamatan Selopuro, maka menjadi TKI adalah salah satu cara yang dapat di tempuh masyarakat guna untuk meningkatkan perekonomian. Pengiriman TKI di Kecamatan Selopuro sendiri masih relatif banyak, itu berarti minat masyarakat di Kecamatan Selopuro masih sangat tinggi dalam hal bekerja ke luar negeri.

Penduduk Kabupaten Blitar yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,48 persen. Sedangkan, persentase pengangguran mengalami penurunan dari 2,39 persen menjadi 2,23 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya menurunkan angka pengangguran cukup berhasil. Berdasarkan tiga kategori lapangan pekerjaan, yaitu sektor pertanian, manufaktur, dan jasa. Persentase penduduk yang bekerja dari

tahun 2018 ke 2019 yang mengalami penurunan adalah yang bekerja di sektor pertanian sebesar 1,13 persen. Sedangkan sektor manufaktur dan jasa mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,91 persen dan 0,02 persen. Hal ini terjadi salah satunya dibantu dari hasil remitansi para TKI, sehingga penduduk bisa mendapatkan modal untuk membuat usaha di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Tabel 1. 3
Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/kota Blitar
Tahun 2018 s.d 2020

Tahun	Jumlah Upah Minimum
2018	Rp.1.653.383,98
2019	Rp. 1.801.406,09
2020	Rp. 1.954.705,75

Sumber: Data Dinamis Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan PP No 78 tahun 2015, telah disebutkan rumus perhitungan kenaikan upah minimum kabupaten/kota. Wilayah Kabupaten/kota Blitar sesuai dengan pengupahan, UMK pada tahun 2018 naik Rp.132.000 rupiah dari UMK tahun sebelumnya. Yakni dari Rp.1.520.912, naik menjadi Rp.1.653.383, atau sekitar 8,7 persen. Upah Minimum Kabupaten setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah upah merupakan permasalahan yang kompleks yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan utamanya bagi pekerja. Bahkan untuk melindungi pekerja, pemerintah telah menetapkan upah minimum agar upah yang diberikan tidak diskriminatif. Namun kenyataannya, hal tersebut belum telaksana secara maksimal, banyak pekerja

yang diupah di bawah standar. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, standar upah yang diberikan kepada buruh yaitu disesuaikan dengan pencapaian usaha yang dimiliki dan cenderung tidak stabil.

Tabel 1. 4
Jumlah Sekolah dan Rasio Kelas pada Setiap jenjang Pendidikan di Kecamatan Selopuro Tahun 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Guru	Ratio Murid-Guru
SD/MI	355	11
SLTP/MTS	148	6
SMA/MA/SMK	14	28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian terdapat perubahan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pendidikan minimal yaitu Sekolah Dasar (SD) atau bisa membaca dan menulis. Walaupun para TKI memiliki pendidikan yang rendah, pemerintah telah membuat kebijakan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kerja guna memenuhi persyaratan. Jika para TKI tetap bekerja di negara asal dengan pendidikan yang rendah sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang tinggi. Namun, bila dibandingkan bekerja di luar negeri terutama sektor informal yang tidak memerlukan ke ahlian khusus dan pendidikan yang tinggi akan memperoleh pendapatan lebih besar. Hal tersebut, menjadi salah satu harapan para TKI melakukan migrasi untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

Dari uraian diatas dapat memberikan gambaran tentang perkonomian di Kecamatan Selopuro yang ditinjau dari sisi berkembangnya jumlah tenaga kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Selopuro mampu memberikan kontribusi melalui remitansinya yang telah dianggap mampu mendongkrak perekonomian keluarga dan lingkungan sosial masyarakat TKI. Aliran dana remitansi dapat dipergunakan secara produktif yang berorientasi dalam membentuk kumpulan asset keuangan (investasi dan tabungan), maupun dalam kegiatan konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik membuat judul penelitian yaitu :**“Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan, Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar”**

B. Rumusan Masalah

Dari kondisi yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di teliti antara lain:

1. Apakah ada pengaruh Upah Minimum terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro KabupatenBlitar ?
2. Apakah ada pengaruh Kemiskinan terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?
3. Apakah ada pengaruh Pengangguran terhadap Migrasi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?
4. Apakah ada pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Migrasi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah minimum terhadap Migrasi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Migrasi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Migrasi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
4. Untuk mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Pendidikan terhadap Migrasi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintahan

Di harapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, pebandingan dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya proses pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan upah minimum di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

2. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi masyarakat.

3. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai upah minimum, kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

4. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi/rujukan untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan migrasi TKI.

E. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, dan tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunannya, maka peneliti membatasi penelitian ini.

1. Ruang Lingkup pembahasan penelitian ini hanya mengenai Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan, Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
2. Objek penelitian ini terdapat 22 (dua puluh dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar dimana peneliti membatasi objek yang digunakan untuk penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
3. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan pengaruh upah

minimum, kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) baik dari data BNP2PTKI, BPS dan pembuktian teori sebelumnya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengaruh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.³

b. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum adalah upah terendah yang diterima pekerja dan merupakan patokan untuk jenis upah yang lain termasuk upah harian, upah borongan dimana upah tersebut dalam sebulan tidak boleh kurang dari nilai upah minimum yang telah ditetapkan dan berlaku disetiap provinsi atau kabupaten/kota.⁴

c. Kemiskinan

Kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

³Kamus Besar bahasa Indonesia, dalam <http://kbbi.kemendikbud.go.id> yang diakses pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 13.15 WIB

⁴Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung Gaji*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), hal.4

ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Pengertian lainnya yang biasa digunakan adalah menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas.⁵

d. Pengangguran

Menurut BPS, pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, mencari pekerjaan tapi merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta diterima kerja tetapi belum mulai bekerja.⁶

e. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.⁷

f. Migrasi Tenaga Kerja Indonesia

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Sebaliknya, migrasi penduduk non permanen adalah perpindahan penduduk

⁵Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2015), hlm. 2

⁶Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id> yang diakses pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 14.35 WIB

⁷Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.5

dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan.⁸

Menurut UU No. 13 Tahun 2013. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebuah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁹

2. Definisi Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian skripsi ini dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.” adalah suatu penelitian untuk memperoleh data dan keterangan mengenai dampak-dampak ekonomi dan sosial yang dipilih peneliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan pengaruh-pengaruh migrasi TKI yang mampu memberikan dampak ekonomi dan social masyarakat di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Selain itu, peeliti mampu mempengaruhi orang agar mereka tetap menaruh kepercayaan dan minat terhadap terbukanya lapangan pekerjaan yang

⁸Mantra Ida Bagus, *Pengantar Studi Demografi*, (Yogyakarta: Nur Cahya, 1985), hlm 157

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dalam www.bpkb.go.id diakases pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 15.40 WIB

disiapkan oleh pemerintahan melalui PJTKI dan instansi yang berhubungan dengan migrasi TKI di Kabupaten Blitar khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas yaitu halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama skripsi ini terdiri dari 6 bab, yang berhubungan antara satu dengan bab lainnya.

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini menggambarkan sedikit mengenai isi dari penelitian, yang termasuk didalamnya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

Bab II: Landasan Teori, pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar acuan yang digunakan dalam menganalisis penelitian, yang termasuk dalam bab ini yaitu hasil penelitian terdahulu, kajian teoritis, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian, pada bab ini memaparkan mengenai gambaran penelitian yang berisikan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian, pada bab ini hasil penelitian berisikan mengenai pemaparan hasil penelitian yang berisi deskripsi data, pengujian hipotesis dan temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan, pada bab ini pembahasan berisikan tentang temuan-temuan penelitian terhadap teori-teori yang sudah ada dan pengujian menggunakan aplikasi statistik

Bab VI: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi.